https://journal.nabest.id/index.php/annajah
e-ISSN: 2964-965X (Media Online) | p-ISSN: 2964-9633 (Media Cetak)
Vol. 5 No.6 (November 2026)

Submitted: 20-09-2026 | Accepted: 09-10-2026 | Published: 01-11-2026

DIALEKTIKA KEADILAN DAN STABILITAS POLITIK: ANALISIS HISTORIS KEPEMIMPINAN KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB (656-661 M)

Andi Mutmainna[1], Mentari Alfidiani[2], Idrus L[3]
[1,2,3] Pendidikan Agama Islam , Tarbiyah, IAIN Bone, Bone, Indonesia

Email: [1]andimutmainnah014@gmail.com, [2]mentarialfidiani@gmail.com, [3]idruslatif.iainbone@gmail.com

Abstract

This study explores the dynamics of Islamic governance and internal political turmoil by comprehensively examining biographical aspects, the transition of political legitimacy, administrative policy instruments, and the escalation of fundamental conflicts. This research employs a descriptive qualitative method based on library research, with data collected from classical Islamic historiographical literature and recent scholarly articles. The findings indicate that Ali ibn Abi Talib's succession as the fourth caliph in 35 AH/656 CE occurred through a controversial transfer of power following the assassination of Uthman ibn Affan. Ali's reform policies included improving administrative governance, optimizing the distribution of the Baitul Mal, strengthening oversight of state officials, and establishing the foundations of Nahwu (Arabic grammar) to preserve the authenticity of the Arabic language, as well as eliminating nepotistic practices from the previous administration. Nevertheless, these progressive measures challenged the interests of the old Quraysh oligarchy (the Umayyads), which had lost its economic and political privileges, thereby triggering major conflicts, namely the Battle of Jamal, the Battle of Siffin, the Tahkim arbitration, and the Battle of Nahrawan. This study concludes that the failure to consolidate Ali's authority was not caused by personal weaknesses but rather by the intense conflict between his ideals of bureaucratic reform and the resistance of the old oligarchic interests. Substantively, this period of leadership reflects the importance of distributive justice, moral accountability, leadership wisdom, and social cohesion in governance.

Keywords: *Ali Ibn Abi Thalib, the Great Fitna, the Rashidun Caliphate, the Battle of Shiffin, Bureaucratic reform, Tahkim.*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika tata kelola pemerintahan Islam serta pergolakan politik internal secara komprehensif dimensi biografis, transisi legitimasi politik, instrumen kebijakan administratif, serta eskalasi konflik fundamental. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka (library research), dengan sumber data berupa literatur historiografi Islam klasik dan tinjauan artikel ilmiah terkini. Hasil kajian mengindikasikan bahwa suksesi Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat pada 35 H/656 M melalui transisi kekuasaan yang kontroversial pasca terbunuhnya Utsman bin Affan. Kebijakan radikal Ali yang diimplementasikan meliputi pembenahan tata kelola administratif, optimalisasi distribusi Baitul Mal, pengetatan pengawasan aparatur negara, hingga peletakan fondasi keilmuan Nahwu demi menjaga otentisitas linguistik Arab, serta bertujuan membersihkan praktik nepotisme era sebelumnya. Kendati demikian, langkah progresif tersebut justru mengusik kenyamanan kubu oligarki Quraisy lama (Bani Umayyah) yang kehilangan hak istimewa ekonomi dan politik mereka, sehingga terjdi konflik besar, yakni Perang Jamal, Perang Siffin, arbitrase Tahkim, hingga Perang Nahrawan. Analisis ini menyimpulkan bahwa kegagalan konsolidasi kekuasaan Ali bukan disebabkan oleh kelemahan personal, melainkan benturan keras antara idealisme reformasi birokrasi melawan arus balik kepentingan oligarki lama. Secara substantif, fase kepemimpinan ini merefleksikan pentingnya keadilan distributif, akuntabilitas moral, kearifan kepemimpinan, serta kohesi sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: Ali Bin Abi Thalib, Fitnah Kubra, Khulafaur Rasyidin, Perang Siffin, Reformasi Birokrasi, Tahkim.

A. PENDAHULUAN

Sejarah peradaban Islam mengalami berbagai perkembangan sejak masa kepemimpinan Nabi Muhammad saw. hingga masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah saw. wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para khalifah yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan ajaran Islam dan mengatur kehidupan masyarakat. Setiap khalifah menghadapi tantangan yang berbeda sesuai dengan kondisi politik, sosial, dan keagamaan pada masanya. Salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

kepemimpinan Islam adalah Ali bin Abi Thalib, yang menjadi khalifah keempat setelah Utsman bin Affan.

Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad saw. yang memiliki kecerdasan, keberanian, keluasan ilmu, dan kebijaksanaan. Sejak usia muda, Ali memiliki kedekatan dengan Rasulullah saw. sehingga memperoleh banyak pengalaman dalam memahami ajaran Islam. Namun, ketika menjadi khalifah pada tahun 35 H/656 M, Ali menghadapi keadaan yang tidak mudah. Ia diangkat menjadi pemimpin setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, ketika kondisi umat Islam sedang mengalami ketegangan politik dan perpecahan. Keadaan tersebut membuat Ali harus menjalankan pemerintahan di tengah berbagai tuntutan dan perbedaan pandangan di kalangan umat Islam.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib berusaha melakukan berbagai pembenahan, terutama dalam bidang administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan negara, dan pengawasan terhadap para pejabat. Selain itu, Ali juga dikenal memiliki perhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan bahasa Arab. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut menghadapi berbagai hambatan karena adanya kepentingan politik dan penolakan dari sejumlah pihak. Kajian mengenai kepemimpinan Ali bin Abi Thalib umumnya terbelah ke dalam dua kutub: kajian apologetis yang semata-mata menyanjung integritas moral Ali (Irfan, 2019; Pulungan, 2018) atau kajian politik pragmatis yang menilai Ali kurang taktis dibanding Mu'awiyah bin Abi Sufyan (Setiawan & Jamilah, 2026; Zein & El-Wakil, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa menjalankan pemerintahan tidak hanya membutuhkan kemampuan dalam mengambil keputusan, tetapi juga memerlukan pertimbangan yang matang dalam menghadapi berbagai kepentingan masyarakat.

Tantangan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib juga terlihat dari terjadinya sejumlah konflik besar selama masa pemerintahannya, seperti Perang Jamal, Perang Siffin, dan Perang Nahrawan. Berbagai pertentangan menyebabkan hubungan di antara kelompok-kelompok umat Islam semakin memburuk. Akibatnya, Ali tidak hanya menghadapi kesulitan dalam menjalankan kebijakan pemerintahan, tetapi juga harus berusaha mempertahankan persatuan umat Islam di tengah situasi politik yang tidak stabil.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dengan berfokus pada biografi dan proses pengangkatannya sebagai khalifah, kebijakan-kebijakan yang diterapkan selama masa pemerintahan, serta peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa kekhalifahannya. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai karakter kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, tantangan yang dihadapinya, dan pengaruh berbagai konflik terhadap jalannya pemerintahan Islam. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan pelajaran mengenai pentingnya keadilan, tanggung jawab, kebijaksanaan, dan persatuan dalam kepemimpinan, baik dalam konteks sejarah maupun kehidupan masyarakat masa kini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (*historical method*) dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini digunakan untuk mengkaji secara kritis dinamika kepemimpinan Ali bin Abi Thalib pada periode 656–661 M, khususnya proses pengangkatannya sebagai khalifah, kebijakan pemerintahan, serta konflik politik yang terjadi selama masa kekhalifahannya. Data penelitian diperoleh dari sumber tertulis berupa buku-buku sejarah Islam dan artikel jurnal ilmiah yang relevan.

Proses penelitian dilakukan melalui empat tahapan metode sejarah. Pertama, heuristik, yaitu mengumpulkan sumber literatur primer/klasik (Tarikh al-Umam wa alMuluk karya At-Tabari, Al-Bidayah wa an-Nihayah karya Ibnu Katsir, Nahj al-Balaghah, dan Tarikh al-Khulafa' karya As-Suyuthi) serta artikel jurnal terakreditasi. Kedua, kritik sumber, yaitu menerapkan kritik eksternal dan kritik internal guna menyaring narasi subjektif atau fanatisme

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

kelompok atas peristiwa pembaiatan dan tahkim. Ketiga, interpretasi, yaitu menelaah kausalitas sejarah antara kebijakan pergantian gubernur era Utsman, penarikan tanah hibah, tuntutan qisas, dan timbulnya perang saudara. Keempat, historiografi, yaitu menyusun hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan sejarah secara kronologis, sistematis, dan kritis agar dinamika kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dapat dipahami sesuai konteks politik dan sosial pada masanya.

Melalui keempat metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian sejarah yang lebih sistematis, kritis, dan objektif dalam menjelaskan dinamika kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya menggambarkan urutan peristiwa sejarah, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan dan konflik politik selama masa pemerintahannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi dan Proses Pengangkatan Ali Bin Abi Thalib Sebagai Khalifah

Ali bin Abi Thalib adalah putra Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf dengan Fatimah binti Asad bin Hasyim bin Abdul Manaf (Pulungan, 2019). Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim Al-Qurasyi Al-Hasyim. Rasulullah memberikan gelar Abu Turab (Mursi, 2007). Abu Thalib memberi nama Ali yang memiliki arti luhur, tinggi, dan agung (Pulungan, 2019). Ia lahir di Makkah 32 tahun setelah kelahiran Rasulullah atau 10 tahun sebelum bi'tsah (pengangkatan sebagai rasul). Ali memiliki wajah yang tampan, dengan warna kulit cokelat, kepala bagian depannya botak, matanya lebar dan kedua bola matanya sangat hitam, bahunya lebar, kedua tangannya kekar, badannya gemuk, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, dan murah senyum (Mursi, 2007).

Ali diasuh sendiri oleh Nabi Muhammad Saw. karena Nabi dahulu juga diasuh oleh Abu thalib (ayah Ali). Ali masuk Islam ketika usia 10 tahun dan menjadi orang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. Masa remajanya juga dihabiskan untuk belajar bersama Rasulullah Saw., sehingga ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, berani, dan bijak. Ketika Rasulullah Saw., melakukan hijrah, Ali yang menggantikan Rasulullah Saw. tidur di tempat tidurnya, sehingga orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Nabi tertipu. Setelah Nabi melakukan hijrah, Nabi menikahkan putri kesayangannya yakni Fatimah Az-Zahra dengan Ali. Ali tidak hanya tumbuh menjadi pemuda yang cerdas tetapi juga berani dalam medan perang. Ia banyak berjasa untuk memenangkan berbagai perang, seperti perang Badar, perang Khandak, dan perang Khaibar (Pulungan, 2019). Ali memiliki banyak kelebihan, penuh semangat, energik serta memiliki wawasan yang luas. Ia juga merupakan pahlawan yang gagah berani, penasihat yang bijaksana, ahli dalam menjadi penasihat hukum, dan seorang sahabat yang sejati serta dermawan (Amin, 2009).

Proses pembai'atan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dilakukan dalam situasi dan kondisi yang tidak normal. Karena beliau dibai'at dalam suasana berkabung atas kematian Utsman bin Affan. Setelah Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, kaum pemberontak mendatangi satu persatu sahabat senior yang ada di kota Madinah, yakni Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Umar bin Al-Khaththab untuk bersedia menjadi khalifah. Namun, mereka menolak termasuk Ali bin Abi Thalib (Pulungan, 2018). Akan tetapi pada akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima atau setuju untuk di bai'at, karena banyaknya desakan dari kaum muhajirin dan kaum anshar. Sebelum Ali menerima untuk di bai'at, Ali mengajukan sebuah syarat yakni pembai'atan harus dilakukan di Mesjid bukan ditempat tersembunyi untuk menghindari prasangka orang bahwa ia menjadi khalifah sekaligus menghilangkan tuduhan tentang keterlibatannya dalam pembunuhan Utsman. Pembaiatan ini berlangsung di Masjid Nabawi, pada

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

tahun 35 H (Rasyid, 2015). Karena pengangkatan Ali sebagai khalifah dilakukan dalam kondisi yang kacau akibat kematian Utsman bin Affan sehingga muncul beberapa tokoh yang tidak mau membai'at Ali, yakni Mu'awiyah bin Abi Sufyan (gubernur Damaskus, dari keluarga Bani Umayyah), Aisyah, Thalhah, dan Zubair. Mereka mengajukan syarat bahwa jika Ali mampu menangkap serta menghukum orang yang telah membunuh Utsman maka, mereka siap memberi ba'iat (Pulungan, 2018).

Untuk menstabilkan situasi politik, Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah (Irak) pada tahun 36 H/657 M, karena wilayahnya strategis dan dekat dengan pusat kekuatan politik Islam pada masa itu. Dari Kufah, Ali melakukan sejumlah pembaruan dalam bidang pemerintahan dan hukum, seperti melakukan penataan pengelolaan keuangan negara melalui Baitul Mal, mengoptimalkan pendistribusian zakat dan harta rampasan perang (ghanimah) secara proporsional, serta memberhentikan sejumlah gubernur yang dianggap tidak menjalankan amanah dengan baik(Rezky et al., 2025). Dalam aspek sosial, Ali juga mengedepankan nilai persamaan dan keadilan dengan tidak membedakan masyarakat berdasarkan suku, ras, maupun kedudukan sosial. Kebijakan tersebut mendapat penolakan dari sebagian kalangan elit Quraisy. Meskipun demikian, sikap tersebut mencerminkan keteguhan Ali dalam menjadikan prinsip hukum dan moral Islam sebagai landasan pemerintahan, dibandingkan mengutamakan kepentingan politik kelompok tertentu.

Jika dilihat dari sisi kepemimpinan, keadaan yang dialami Ali menunjukkan bahwa menjadi seorang pemimpin tidak cukup hanya dengan memiliki kecerdasan, keberanian, dan pengalaman. Seorang pemimpin juga harus mampu menghadapi perbedaan pendapat serta mengambil keputusan dengan mempertimbangkan keadaan yang sedang terjadi. Dalam kasus Ali, tuntutan untuk menegakkan keadilan atas terbunuhnya Utsman harus dihadapi bersamaan dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan dan kestabilan pemerintahan. Oleh karena itu, persoalan yang muncul pada masa awal kekhalifahannya tidak dapat dilepaskan dari situasi politik yang sedang terjadi pada saat itu.

Dengan demikian, kepemimpinan memiliki tantangan yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Ali bin Abi Thalib memiliki banyak kelebihan, tetapi ia harus memimpin ketika umat Islam sedang mengalami perpecahan. Pengalaman ini menunjukkan pentingnya sikap bijaksana, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan kepemimpinan. Selain itu, seorang pemimpin juga perlu berusaha membangun persatuan tanpa mengabaikan keadilan. Nilai-nilai tersebut masih relevan hingga sekarang karena seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari kemampuannya dalam menjalankan tugas, tetapi juga dari caranya menghadapi masalah dan menjaga kepercayaan masyarakat.

2. Kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam Pemerintahannya

Setelah Ali bin Abi Thalib dibai'at di Masjid Nabawi untuk menjadi khalifah, beliau menyampaikan pidato politiknya sebagaimana berikut.

"Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab suci Alquran yang menerangkan tentang baik dan buruk. Oleh sebab itu, hendaklah kalian ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Kebaikan yang kalian tunaikan kepada Allah akan membawa ke surga. Sesungguhnya, Allah telah mengharamkan apa yang haram. Dia memuliakan kehormatan seorang muslim, yang berarti memuliakan seluruhnya. Dia pun memuliakan keikhlasan dan tauhid kaum muslimin. Karena itu, hendaklah setiap muslim menyelamatkan manusia dengan kebenaran lisan dan tangannya. Ia tidak boleh menyakiti seorang muslim, kecuali ada yang membolehkannya. Segeralah kalian

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

melaksanakan urusan umum; karena sesungguhnya urusan manusia menanti di depan kalian, sedangkan orang yang di belakang sekarang bisa membatasi dan meringankan urusan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, kalian bertanggung jawab dalam segala urusan, termasuk urusan tanah dan hewan (lingkungan). Dan, taatlah kepada Allah dan jangan kalian mendurhakai-Nya. Apabila kalian melihat yang baik, ambillah; dan jika kalian melihat yang buruk, tinggalkanlah."

Dalam pidato tersebut menunjukkan bahwa khalifah Ali bin Abi Thalib memberikan perintah untuk umat Islam tetap berpegang teguh kepada Al-quran sebagai kitab petunjuk antara yang hak dan yang batil, yang membimbing manusia menuju ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, mengabdi kepada-Nya, saling memelihara kehormatan sesama muslim dan umat lain, serta yang mematuhi pemerintah (Pulungan, 2018).

Pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah berada dalam situasi dan kondisi yang sulit sehingga mengkibatkan berbagai kesulitan yang tidak sedikit. Beratnya tugas pemerintahan yang mengharuskan Ali bin Abi Thalib untuk mengambil kebijakan-kebijakan demi menciptakan kondisi negara yang aman (Setiawan & Jamilah, 2026). Kebijakan khalifah Ali bin Abi Thalib terkait dengan urusan dalam negeri adalah memecat semua gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman seperti Muawiyah bin Abi Sufyan yang dipecat dari jabatan gubernur Syam karena tidak loyal terhadap hukum dan keadilan. Khalifah Ali juga menolak keras praktik nepotisme dan suap. Dalam suratnya kepada para amil (pejabat pajak), khalifah Ali menegaskan: "Janganlah engkau mengambil harta rakyat melebihi haknya, dan jangan menahan hak mereka walau sedikit". Kemudian khalifah Ali juga menarik kembali tanah-tanah yang telah dibagikan, serta melakukan pengawasan ketat kepada para pejabat negara. Sikap ini menunjukkan prinsip hukum Ali yang menekankan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial, serta menolak segala bentuk pelanggaran moral dalam pemerintahan. Sementara kebijakan untuk luar negeri, khalifah Ali bin Abi Thalib berhasil meneruskan kebijakan perluasan wilayah para pendahulunya. Serta mendirikan permukiman militer di perbatasan Suriah, dan membangun benteng-benteng yang kuat di perbatasan Persia (Pulungan, 2018). Selain itu, Ali bin Abi Thalib juga membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, dengan menyita harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar, selanjutnya harta itu disimpan di Baitul Mal untuk keperluan rakyat (Munawira et al., 2024).

Meskipun para sejarawan mencatat berbagai kontroversi dan tantangan besar pada masa kekhalifaan Ali, para ulama dan tradisi Sunni kemudian menyaring dan merehabilitasi citranya, menempatkannya sebagai figur yang berupaya menegakkan keadilan, memperbaiki Baitul Mal, serta menghadapi perpecahan internal ditengah situasi politik yang sangat tidak stabil (Husayn, 2019).

Ali bin Abi Thalib juga menekankan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan sebagai alat utama untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan dalam hidup. Baginya, pendidikan bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga merupakan bekal bagi kehidupan di akhirat. Selain itu, Ali juga dikenal sebagai pengajar ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang bahasa, kepada para sahabat dan pengikutnya. Oleh karena itu, khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai sosok yang memiliki kepedulian mendalam terhadap bahasa Arab dan keakuratan dalam memahami teks-teks agama. Sebagai seorang ahli tafsir dan pemimpin yang bijaksana, beliau menyadari menjaga kemurnian bahasa Arab sangatlah penting. Untuk menjaga kemurnian bahasa Arab beliau memberikan arahan dan petunjuk mengenai cara berbicara dan memahami bahasa Arab dengan tepat, khususnya dalam hal struktur kalimat dan bentuk kata (Zulqornaen, 2025). Hal ini penting karena semakin luasnya wilayah Islam membuat banyak masyarakat non-Arab mempelajari

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, pemahaman bahasa Arab menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar ajaran Islam dapat dipahami dengan baik.

Dalam menafsirkan teks Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam, banyak kesalahan yang terjadi akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam dan keberagaman penduduk non-Arab. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengingatkan bahwa kesalahan ini sangat serius, terutama bagi mereka yang mempelajari ajaran Islam dari sumber aslinya, yaitu bahasa Arab. Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib memberikan tugas kepada Abu al-Aswad al-Duali untuk menyusun dasar-dasar Ilmu Nahwu (Qawaid Nahwiyah). Dengan menggunakan Ilmu Nahwu, mereka yang bukan berasal dari kalangan Arab akan lebih mudah memahami dan membaca sumber-sumber ajaran Islam dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, kontribusi awal dalam perkembangan ilmu Nahwu sangat berharga dan patut dihargai kepada Ali bin Abi Thalib (Zulqornaen, 2025).

Di balik prinsip keadilan yang dipegang teguh, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib juga menghadapi dilema antara idealisme moral dan realitas politik. Keputusannya untuk memberhentikan Mu'awiyah dari jabatan gubernur Syam menunjukkan keteguhan Ali dalam menegakkan otoritas pemerintahan dan prinsip keadilan. Namun, dalam situasi politik yang belum stabil, kebijakan tersebut juga memiliki konsekuensi strategis karena memperbesar penolakan dari kelompok yang memiliki kekuatan politik dan militer. Dengan demikian, sikap Ali dapat dipandang sebagai bentuk keteguhan moral, tetapi sekaligus memperlihatkan sulitnya mempertahankan stabilitas politik ketika prinsip keadilan berhadapan dengan kepentingan kekuasaan. Dilema ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya menuntut integritas, tetapi juga pertimbangan strategis dalam menghadapi situasi krisis.

Dengan demikian, kebijakan Ali bin Abi Thalib tidak hanya berkaitan dengan urusan pemerintahan, tetapi juga mencakup keuangan negara dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dari kebijakan tersebut, dapat dipahami bahwa Ali berusaha menjalankan tugasnya dengan mengutamakan keadilan dan kepentingan umat Islam, meskipun keadaan politik pada masa pemerintahannya membuat berbagai kebijakan tersebut sulit dilaksanakan.

3. Peristiwa-Peristiwa Penting Pada Masa Ali bin Abi Thalib

a. Peristiwa Perang Jamal

Perang Jamal terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun 36H atau Desember 656M. Aisyah Ra. ikut terlibat dalam peperangan ini karena menuntut atas kematian Utsman bin Affan kepada Ali bin Abi Thalib, sama seperti yang dituntut oleh Thalhah dan Zubair ketika membai'at Ali menjadi Khalifah. Akhirnya, Aisyah ra. bergabung dengan Thalhah dan Zubair dalam oposisi terhadap Ali dan kemudian pergi ke Basrah (Junaidin, 2020).

Ketika Ali bin Abi Thalib mengetahui bahwa pasukan Thalhah, Zubair, dan Aisyah telah sampai di Basrah, beliau segera mengerahkan pasukannya menuju Basrah yang awalnya dipersiapkan untuk menumpas Muawiyah di Damaskus. Kedua pasukan tersebut bertemu di Khuraibah dekat Basrah. Dalam situasi tersebut, Ali masih berupaya untuk damai dengan mengirim surat kepada Aisyah dan meminta untuk diadakan perundingan antara Ali, Aisyah, Thalhah, dan Zubair. Ketika perundingan berlangsung, sebagian pasukan Ali yang dipimpin oleh Abdullah Ibn Saba' menyerang kelompok Thalhah dan Zubair tanpa sepengetahuan Ali, sehingga peperangan pun tidak dapat dihindari. Perang ini merupakan perang saudara antara sesama umat Islam yang pertama kali terjadi. Perang ini kemudian disebut dengan

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

perang Jamal (unta) karena dalam perang tersebut Aisyah mengendarai Unta (Rasyid, 2015).

Perang tersebut dimenangkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, sedangkan Thalhah dan Zubair terbunuh ketika hendak melarikan diri. Sementara Aisyah ra. dikembalikan ke Madinah. Dalam peperangan tersebut sebanyak 20.000 kaum muslimin gugur. Perang Jamal (unta) ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam catatan sejarah Islam (Amin, 2009).

b. Peristiwa Perang Siffin dan Tahkim

Pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak memperoleh pengakuan di wilayah Suriah, karena adanya kekuatan oposisi yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dari pusat pemerintahannya di Damaskus. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan kerabat dekat Utsman bin Affan sehingga ia merasa berkewajiban untuk menuntut balasan atas kematian Utsman dan membela kehormatan keluarganya. Muawiyah mendapat dukungan kuat dari kabilah-kabilah Quraisy Makkah yang berpengaruh secara ekonomi, serta dari masyarakat Arab di Syam yang mengapresiasi gaya kepemimpinannya yang tegas dan teratur (Setiawan & Jamilah, 2026).

Perang saudara pertama terjadi setelah terbunuhnya khalifah ketiga (Utsman bin Affan) yang memicu Aisyah, Thalhah, dan Zubair untuk melawan Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal (Unta) dan kemudian berlanjut pada perang yang kedua yakni perang Siffin. Perang saudara berpotensi membawa kehancuran bagi diri umat Islam sendiri (Zein & El-Wakil, 2022).

Sebelum perang Siffin terjadi, Ali bi Abi Thalib berulang kali mengirim utusan kepada Muawiyah untuk mengupayakan penyelesaian secara damai, namun usahanya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Ali menyadari bahwa jika keadaan ini dibiarkan, maka posisi Muawiyah berpotensi menjadi ancaman serius bagi keutuhan kekuasaan Islam, terlebih lagi ketika seluruh wilayah lain telah berada dibawah satu otoritas, kecuali daerah yang dipimpin Muawiyah. Melihat situasi yang semakin memanas, Ali bin Abi Thalib memerintahkan pasukannya untuk bersiap dan sekitar 50.000 pasukan siap menuju Syam (Setiawan & Jamilah, 2026).

Sementara pasukan muawiyah melakukan strategi dengan datang lebih dulu di Siffin agar bisa menguasai daerah sekitar sungai Eufrat serta menguasai pembekalan air. Karena dengan menguasai sungai itu, pasukan lawan (pasukan Ali) akan mengalami kehausan. Dugaan Muawiyah ternyata benar, pasukan Ali yang belum lama tiba sudah mulai kekurangan air minum. Mereka berusaha medapat pembekalan air dari sungai, akan tetapi pasukan Muawiyah menjaga ketat sepanjang tepi sungai itu agar pasukan Ali tidak mengambil air di sungai tersebut. Khalifah Ali bin Abi Thalib menyadari bahwa air sungai Eufrat sangat dibutuhkan pasukan dan hewan-hewan tunggangannya. Jika pasukannya tidak mendapat air maka mereka akan kalah sebelum bertempur dan semua hewan tunggangannya akan mati kehausan. Oleh karena itu, Ali mempersiapkan pasukannya untuk melakukan serangan kilat dan terbatas untuk merebut lokasi yang sangat strategis itu. Tidak lama kemudian pasukan Muawiyah terusir dari posisi tersebut dan pasukan Ali bersama hewan tunggangannya mendapat air sepuasnya. Pada tahap pertama pertempuran antara kedua pasukan itu hanya berlangsung secara kecil-kecilan, yaitu satu lawan satu, dan kelompok lawan kelompok, pertempuran ini belum melibatkan seluruh pasukan. Melihat hal ini Ali tidak bisa bersabar lagi karena keadaan ini hanya mengulur-ulur waktu serta bisa berlarut-larut dan juga hanya menguntungkan Muawiyah yang menggunakan kesempatan itu untuk menyebar fitnah dan mematahkan semangat pasukan Ali (Al Husaini, 1981).

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Peperangan besar akhirnya terjadi di Siffin pada bulan Shafar tahun 37H, pasukan Ali hampir memperoleh kemenangan, dan pasukan Muawiyah bersiap-siap untuk melarikan diri. Tetapi pada waktu itu 'Amr bin Ash menjadi tangan kanan Muawiyah yang terkenal sebagai seorang ahli siasat perang untuk meminta berdamai dengan mengangkat Al-Qur'an sebagai tanda bahwa pertempuran harus dihentikan dan persoalan diselesaikan melalui perundingan, dengan didasarkan pada hukum Al-Qur'an. Mekanisme penyelesaian ini kemudian dikenal dengan istilah tahkim (arbitrase) (Setiawan & Jamilah, 2026).

Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan berat menerima arbitrase tersebut, karena Ali mengetahui bahwa itu hanya siasat buruk dari Amr bin Ash. Sebagai perantara dalam peristiwa tahkim ini, pihak Ali diwakili oleh Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin Ash yang mewakili pihak Muawiyah. Sejarah mencatat bahwa diantara keduanya terdapat kesepakatan untuk menjatuhkan Ali dan Muawiyah secara bersamaan. Kemudian setelah itu dipilih seorang khalifah yang baru. Selanjutnya, Abu Musa Al-Asy'ari sebagai orang tertua lebih dahulu mengumumkan kepada masyarakat untuk menjatuhkan kedua pemimpin itu dari jabatannya masing-masing. Sedangkan Amr bin Ash mengumumkan bahwa ia menyetujui keputusan dijatuhkannya Ali dari jabatan sebagai khalifah yang telah diumumkan Abu Musa itu, maka yang berhak menggantikannya adalah Muawiyah (Junaidin, 2020).

Upaya arbitrase yang awalnya untuk mempersatukan kaum Muslim yang sedang bertikai berakhir dengan hasil yang buruk, serta ketegangan politik semakin tajam dan rumit. Peristiwa ini jelas lebih merugikan posisi Ali bin Abi Thalib dan menguntungkan Muawiyah. Secara normatif, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang sah, sedangkan Muawiyah pada awalnya hanyalah seorang gubernur yang menolak tunduk pada otoritasnya. Melalui peristiwa tahkim, posisi Muawiyah naik menjadi semacam khalifah de facto meski tidak resmi, sehingga wajar jika Ali menolak keputusan tersebut (Setiawan & Jamilah, 2026).

Peristiwa tahkim ini juga menimbulkan golongan ketiga yakni Al-Khawarij (golongan orang-orang yang keluar dari barisan Ali). Akibatnya diujung pemerintahan Ali bin Abi Thalib umat Islam terpecah menjadi tiga kekuatan politik, yakni Mu'awiyah, Syi'ah (pengikut Ali), dan Al-Khawarij (orang-orang yang keluar dari barisan Ali) (Ahmadin, 2022).

c. Peristiwa Perang Nahrawan

Perang Nahrawan terjadi pada tahun 38 H/658 M. Perang ini berawal dari munculnya pertentangan di kalangan pendukung Ali setelah terjadinya tahkim atau arbitrase antara pihak Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebelumnya, sebagian pendukung Ali mendesak agar perselisihan dengan Muawiyah diselesaikan melalui tahkim. Namun, setelah keputusan tersebut diterima, sebagian dari mereka justru menolak dan menganggap bahwa penerimaan tahkim merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai kaum Khawarij. Perubahan sikap tersebut menunjukkan bahwa konflik yang dihadapi Ali tidak hanya berasal dari pihak Muawiyah, tetapi juga muncul dari kalangan pendukungnya sendiri (Pratama & Dian, 2023).

Penolakan kaum Khawarij terhadap hasil tahkim semakin memperburuk keadaan politik pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak hanya menentang kebijakan khalifah, tetapi juga menuntut agar Ali kembali memerangi Muawiyah. Akan tetapi, Ali tidak memenuhi tuntutan tersebut karena persoalan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan hanya melalui peperangan. Dalam perkembangannya, pertentangan tersebut semakin serius karena sebagian anggota kelompok Khawarij melakukan tindakan kekerasan terhadap kaum Muslimin yang

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

berbeda pandangan dengan mereka. Tindakan tersebut menjadi salah satu alasan yang mendorong Ali untuk mengambil langkah tegas untuk mengatasi ancaman yang muncul di wilayah kekuasaannya.

Sebelum menghadapi kaum Khawarij melalui peperangan, Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu berusaha menyelesaikan persoalan secara damai. Ia berupaya menjelaskan kekeliruan pandangan mereka dan mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Upaya tersebut menunjukkan bahwa Ali tidak langsung menjadikan kekuatan militer sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan konflik. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada pihak yang menentangnya untuk mempertimbangkan kembali sikap dan tindakan mereka. Usaha tersebut membuahkan hasil karena sebagian anggota Khawarij bersedia meninggalkan kelompoknya dan kembali bergabung dengan Ali. Namun, sebagian lainnya tetap mempertahankan pendirian mereka sehingga pertentangan tidak dapat diselesaikan sepenuhnya (Pratama & Dian, 2023).

Keadaan semakin memburuk ketika kaum Khawarij melakukan tindakan kekerasan terhadap sejumlah orang yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Salah satu korban yang disebut dalam sumber sejarah adalah Abdullah bin Khabbab. Selain itu, ketika Ali mengutus Al-Harits bin Murrah Al-'Abdi untuk menemui mereka, utusan tersebut juga dibunuh. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa konflik yang semula berkaitan dengan perbedaan pandangan politik dan keagamaan telah berkembang menjadi persoalan keamanan yang lebih luas. Ali kemudian mengerahkan pasukannya untuk menghadapi kelompok tersebut. Pertempuran pun terjadi di Nahrawan dan berakhir dengan kekalahan kaum Khawarij. Abdullah bin Wahab, yang disebut sebagai salah seorang pemimpin mereka, juga terbunuh dalam pertempuran tersebut (Irfan, 2019).

Meskipun berhasil mengalahkan kaum Khawarij, kebijakan Ali bin Abi Thalib setelah Perang Nahrawan juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Ali tidak memperlakukan seluruh pihak yang kalah dengan cara yang sama. Ia memerintahkan agar orang-orang yang terluka dikumpulkan dan dikembalikan kepada keluarga atau kabilah mereka untuk mendapatkan perawatan. Selain itu, ia tidak membagikan harta yang diperoleh dari medan perang sebagai rampasan perang, tetapi mengembalikannya kepada keluarga yang berhak. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa tindakan militer yang dilakukan Ali ditujukan untuk menghentikan ancaman, bukan untuk membalas dendam atau mengambil keuntungan materi dari kekalahan lawannya (Irfan, 2019).

Perang Nahrawan menunjukan bahwa Ali bin Abi Thalib menghadapi persoalan pemerintahan yang cukup kompleks. Di satu sisi, ia harus menghadapi Muawiyah yang masih menjadi lawan politiknya. Di sisi lain, ia juga harus mengatasi perlawanan kaum Khawarij yang sebelumnya merupakan bagian dari pendukungnya sendiri. Kondisi ini menyebabkan perhatian dan kekuatan pemerintahan Ali terbagi dalam menghadapi berbagai persoalan. Konflik internal tersebut tidak hanya mengganggu stabilitas politik, tetapi juga memperbesar perpecahan di kalangan umat Islam. Dengan demikian, Perang Nahrawan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pertempuran antara dua kelompok, melainkan juga sebagai gambaran sulitnya mempertahankan persatuan umat ketika perbedaan politik dan penafsiran keagamaan berkembang menjadi permusuhan.

Perang Nahrawan juga berkaitan dengan peristiwa yang terjadi menjelang akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Setelah kekalahan mereka di Nahrawan, kebencian sebagian kaum Khawarij terhadap Ali semakin menguat. Dalam perkembangan berikutnya, sekelompok orang dari kalangan Khawarij merencanakan pembunuhan terhadap Ali, Muawiyah, dan Amr bin Ash. Namun, rencana tersebut

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

tidak sepenuhnya berhasil. Ali menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam pada tahun 40 H/661 M. Sementara Muawiyah dan Amr bin Ash selamat dari upaya pembunuhan tersebut (Junaidin, 2020).

Tabel 1. Matriks Dialetika Kebijakan, Konflik Internal, dan Resolusi Politik Era Ali bin Abi Thalib

Peristiwa/ Kebijakan	Latar Belakang & Akar Friksi	Aktor Utama yang Terlibat	Sikap & Keputusan Khalifah Ali	Dampak Epistemologis & Sosio-Politik
Reformasi Birokrasi & Baitul Mal	Penumpukan kekayaan pejabat era Utsman dan tuntutan transparansi distribusi kas negara.	Ali bin Abi Thalib vs Oligarki pejabat daerah dan kerabat Umayyah.	Mencopot gubernur bermasalah, menyita kembali tanah hibah negara, dan menerapkan kontrol aset ketat.	Menegakkan keadilan distributif, namun memicu resistensi politik keras dari kelompok elit lama.
Perang Jamal (36 H / 656 M)	Tuntutan penyelesaian hukum atas pembunuhan Khalifah Utsman sebelum konsolidasi kekuasaan tuntas.	Pasukan Ali vs Aisyah binti Abu Bakar, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awwam.	Menempuh jalur negosiasi surat-menyurat damai; menolak perang hingga provokasi tak terelakan; memulangkan Aisyah dengan hormat.	Perang saudara antarmuslim pertama; gugurnya Thalhah dan Zubair; pusat politik Islam bergeser ke Kufah.
Perang Siffin & Peristiwa Tahkim (37 H / 657 M)	Penolakan baiat oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan di Syam dengan dalih penuntutan darah Utsman.	Pasukan Kufah (Ali) vs Pasukan Syam (Mu'awiyah & Amr bin Ash).	Mengutamakan dialog; melancarkan serangan balasan saat perundingan buntu; menerima arbitrase (*tahkim*) demi mencegah pertumpahan darah.	Melemahnya otoritas kekhalifahan sah; terangkatnya posisi de facto Mu'awiyah; munculnya friksi internal kaum Khawarij.
Perang Nahrawan (38 H / 658 M)	Pembelotan kelompok Khawarij yang mengkafirkan Ali dan Mu'awiyah atas penerimaan klausul tahkim (*La hukma illa lillah)*.	Pasukan Khalifah Ali vs Kelompok Khawarij (Abdullah bin Wahab ar-Rasyid).	Berdialog teologis mengoreksi doktrin ekstremis; melancarkan tindakan militer setelah Khawarij melakukan teror sipil.	Hancurnya kekuatan militer Khawarij di Nahrawa; memicu aksi balas dendam konspiratif yang berujung pada syahidnya Ali (40 H).

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib menghadapi banyak masalah, terutama konflik di antara sesama umat Islam. Perbedaan pendapat yang awalnya berkaitan dengan masalah politik dan penegakan keadilan akhirnya berkembang menjadi peperangan. Perang Jamal terjadi karena adanya tuntutan dari sejumlah tokoh untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Setelah itu, Ali menghadapi Muawiyah bin Abi Sufyan dalam Perang Siffin karena adanya perbedaan pandangan mengenai kepemimpinan dan penyelesaian kasus tersebut. Persoalan semakin rumit setelah terjadinya tahkim yang kemudian menyebabkan sebagian pendukung Ali keluar dari barisannya dan membentuk kelompok Khawarij. Upaya menyelesaikan konflik melalui tahkim justru menimbulkan masalah baru. Keadaan ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan akan semakin sulit diselesaikan apabila masing-masing pihak tetap mempertahankan pendiriannya dan tidak menemukan kesepakatan bersama. Dalam menghadapi berbagai konflik tersebut, Ali tidak selalu mengutamakan peperangan. Ia terlebih dahulu berusaha menyelesaikan masalah melalui perundingan dan mengajak pihak yang berseberangan untuk mencari jalan damai. Namun, ketika upaya tersebut tidak berhasil dan muncul tindakan yang mengancam keselamatan masyarakat, Ali akhirnya mengambil tindakan tegas. Hal ini dapat dilihat dalam Perang Nahrawan ketika ia menghadapi kaum Khawarij yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahannya.

Sejarah pemerintahan Ali juga mengingatkan bahwa perpecahan di antara sesama umat Islam dapat menimbulkan dampak yang luas, bahkan melemahkan pemerintahan dan memengaruhi perjalanan sejarah Islam pada masa berikutnya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat pada masa Khulafaur Rasyidin yang dikenal memiliki kecerdasan, keberanian, keluasan ilmu, dan sikap yang menjunjung tinggi keadilan. Kedekatannya dengan Nabi Muhammad saw. sejak usia muda memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan yang menjadi bekal dalam

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menjalankan kepemimpinan. Ali diangkat menjadi khalifah pada tahun 35 H/656 M setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Namun, proses pengangkatannya berlangsung dalam keadaan politik yang tidak stabil sehingga sejak awal pemerintahannya, Ali telah dihadapkan pada berbagai persoalan dan perbedaan pandangan di kalangan umat Islam.

Selama menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib berusaha memperbaiki pemerintahan melalui berbagai kebijakan, seperti pergantian sejumlah gubernur, pengawasan terhadap pejabat negara, penataan kembali pengelolaan tanah, serta pembenahan Baitul Mal. Ia juga memberikan perhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bahasa Arab. Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan upayanya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih adil dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan karena adanya perbedaan kepentingan dan penolakan dari sejumlah pihak.

Tantangan terbesar dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib terlihat dari terjadinya Perang Jamal, Perang Siffin, peristiwa tahkim, dan Perang Nahrawan. Berbagai konflik tersebut berawal dari persoalan pembunuhan Utsman bin Affan, perbedaan pandangan mengenai kepemimpinan, serta ketidakpuasan terhadap penyelesaian konflik melalui tahkim. Akibatnya, perselisihan di kalangan umat Islam semakin meluas dan menyebabkan perpecahan politik. Keadaan ini membuat Ali mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan sekaligus mempertahankan persatuan umat Islam. Masa pemerintahannya kemudian berakhir setelah ia dibunuh pada tahun 40 H/661 M.

Dengan demikian, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib berlangsung dalam keadaan yang penuh tantangan. Ia berusaha menjalankan pemerintahan dengan mengutamakan keadilan dan tanggung jawab, tetapi kondisi politik yang tidak stabil serta konflik internal membuat berbagai upayanya sulit dilaksanakan secara maksimal. Pengalaman kepemimpinannya memberikan pelajaran bahwa seorang pemimpin tidak hanya membutuhkan kecerdasan dan keberanian dalam mengambil keputusan, tetapi juga harus mampu menghadapi perbedaan pendapat, menyelesaikan konflik, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, sejarah pemerintahan Ali bin Abi Thalib menunjukkan bahwa persatuan merupakan hal penting dalam kehidupan umat karena perpecahan dapat menghambat jalannya pemerintahan dan menimbulkan dampak yang berkepanjangan.

2. Saran

Kajian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada analisis literatur sekunder umum. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan telaah kritis berbasis naskah primer (seperti analisis filosofis naskah perjanjian tahkim dalam dokumen awal Islam) atau mengkaji dampak pemindahan ibu kota dari Madinah ke Kufah terhadap dinamika sosio-religius masyarakat perkotaan Islam awal.

E. DAFTAR PUSTAKA

Ahmadin. (2022). *Sejarah Peradaban Islam*.

Al Husaini, H. M. H. A. H. (1981). *Sejarah Hidup Imam Ali bin Abi Thalib*.

Amin, S. M. (2009). *Sejarah Peradaban Islam*.

Husayn, N. (2019). The Rehabilitation of ʿ Ali in Sunni Hadith and Historiography. *Journal of the Royal Asiatic Society*, *29*(4), 565–583. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1356186319000427

Irfan, A. H. (2019). *Sejarah Perjalanan Hidup Ali bin Abi Thalib*.

Junaidin. (2020). Pemerintahan Ali bin Abi Thalib Dan Permulaan Konflik Umat Islam: Peristiwa Tahkim. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, *1*(1), 33–48. https://doi.org/https://doi.org/10.47625/fitua.v1i1.227

Munawira, S., Hamriani, S., & Rama, B. (2024). Biografi Ali bin Abi Thalib. *ULIL ALBAB:Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *3*(5), 88–95.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v3i5.3298

Mursi, M. S. (2007). *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*.

Pratama, T. S., & Dian, P. (2023). Masa Pemerintahan Ali bin Abi Thalib Dari Tahun 655-660M. *JAZIRAH: Jurnal Peradaban Kebudayaan*, *4*(2), 111–118. https://doi.org/https://doi.org/10.51190/jazirah.v4i2.82

Pulungan, S. (2018). *Sejarah Peradaban Islam*.

Pulungan, S. (2019). *Sejarah Pendidikan Islam*.

Rasyid, S. (2015). Kontroversi Sekitar Kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib. *RIHLAH: Jurnal Sejarah dan Budaya*, *2*(1), 13–20. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/rihlah.v2i01.1352

Rezky, M., Rahmah, N., Suryaningtias, N. D., & Malika, D. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Sejarah Dan Hukum Dalam Kepemimpinan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, *3*(5), 7351–7360. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2514

Setiawan, A., & Jamilah. (2026). Kontekstualisasi Gagasan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam Persatuan Umat Islam. *Sajaratun : Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, *11*(1), 10–20. https://doi.org/https://doi.org/10.37478/sajaratun.v11i1.8045

Zein, I., & El-Wakil, A. (2022). The Siffin Arbitration Agreement And Statecraft In Early Islamic Political Documents. *Journal of Islamic Studies*, *2*(33), 153–202. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jis/etac001

Zulqornaen, F. A. (2025). Pengaruh Khalifah Ali bin Abi Thalib Dalam Lahirnya Ilmu Nahwu : Studi Sejarah Awal Pembentukan Kaidah Bahasa Arab. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, *2*(3), 275–290. https://doi.org/https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i3.206

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)